

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA  
WISATA PROVINSI BENGKULU  
(Studi kasus di Kabupaten Kepahiang)**

**Oleh :**

**Rosa Oktapia, Titi Darmi<sup>\*</sup>, Rekho Adriadi, Rosidin**

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

\*Email Koresponden: [titidarmi@umb.ac.id](mailto:titidarmi@umb.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Program Lomba Desa Wisata di Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 12 informan yang terdiri dari pihak Dinas Pariwisata, kepala desa, dan pengurus Pokdarwis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek *context*, program ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan pariwisata daerah dan potensi lokal yang dimiliki desa. Dari aspek *input*, kebijakan dan dukungan kelembagaan cukup baik, namun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang. Pada aspek *process*, pelaksanaan program sudah berjalan sesuai prosedur, tetapi pendampingan dan monitoring pasca-lomba masih minim. Dari aspek *product*, program berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata dan mendorong partisipasi lokal, meskipun dampak ekonomi dan keberlanjutan belum optimal. Secara keseluruhan, program ini dinilai cukup efektif dalam mendorong pengembangan desa wisata, namun perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, pendampingan berkelanjutan, serta promosi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar manfaat program dapat berlangsung secara berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Evaluasi; Desa Wisata; Pariwisata; Model CIPP; Kabupaten Kepahiang.

**ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the effectiveness of the Tourism Village Competition Program in Kepahiang Regency using the CIPP (Context, Input, Process, Product) model. A qualitative descriptive method was used, with data obtained through interviews, observations, and documentation involving 12 informants, including Tourism Office staff, village heads, and Pokdarwis members. The results show that in the context aspect, the program aligns with regional tourism development needs and local potential. In terms of input, policies and institutional support are adequate, though human resources and infrastructure remain limited. The process aspect indicates that implementation followed proper procedures, yet post-competition mentoring and monitoring were insufficient. The product aspect reveals increased community awareness and participation in tourism, although economic impact and sustainability are still suboptimal. Overall, the program is considered moderately effective but requires strengthened human resource capacity, continuous mentoring, and enhanced promotion and collaboration among stakeholders to ensure long-term sustainability.*

**Keywords:** Evaluation, Tourism Village, Tourism, CIPP Model, Kepahiang Regency.

**A. Pendahuluan**

Evaluasi dalam penggunaannya yang paling umum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan nilai (value). Evaluasi terhadap suatu kebijakan umumnya dilakukan setelah kebijakan tersebut berjalan dalam jangka waktu tertentu. Tidak ada ketentuan waktu yang pasti untuk melakukan evaluasi, namun dibutuhkan durasi yang memadai, seperti lima tahun agar hasil dan dampaknya dapat terlihat secara jelas. Melakukan evaluasi terlalu dini dapat menghasilkan penilaian yang kurang akurat karena dampak kebijakan mungkin belum sepenuhnya muncul. Terlebih lagi, kebijakan yang bersifat strategis biasanya memerlukan waktu lebih lama untuk dievaluasi secara menyeluruh. Sebaliknya, semakin teknis dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relative lebih cepat semenjak di terapkannya kebijakan yang bersangkutan (Subarsono, 2005) dalam (Sari, 2022).

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Evaluasi program dilakukan merupakan upaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan yang telah di rencanakan. (Suharsimi Arikunto, 1993) dalam (Pratama, 2022).

Kabupaten Kepahiang ialah suatu wilayah yang berada di

Provinsi Bengkulu terdiri dari 8 kecamatan dan 105 desa serta mempunyai luas wilayah 710,11 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk nya 155.52 ribu jiwa. Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui jajarannya mengeluarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun, 2022) Tentang Desa Wisata untuk meningkatkan ekonomi, terutama sektor pariwisata. Dengan Perda ini, desa memiliki peluang untuk menjadi destinasi wisata atau membangun wisata.

Lomba Desa Wisata ini dirancang untuk memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil mengembangkan potensi wisata mereka dengan terus menggalih potensi-potensi yang ada, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan wisata. Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi desa-desa di Kepahiang untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola desa wisata. Adapun Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 415-073 Tahun 2024 Tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Kepahiang.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program ini mampu berjalan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan, serta mengidentifikasi kendala struktural maupun teknis yang dihadapi oleh para pelaksana di lapangan. Dari dua puluh desa wisata yang mengikuti lomba desa wisata di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Ada empat desa yang berhasil memasuki 10 besar, yaitu Desa Batu Ampar, Desa Tangsi Duren, Desa Air Sempiang, dan Desa Batu Kalung. Keempat desa wisata

ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam lomba wisata. Namun, meskipun berhasil masuk ke dalam 10 besar, berbagai masalah di lapangan masih menjadi tantangan besar bagi pengembangan potensi wisata di desa-desa tersebut.

Objek penelitian ini dipilih berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan program lomba desa wisata. Setelah ke empat desa wisata berhasil memasuki 10 besar dalam lomba desa wisata tersebut, tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Akibatnya, tata kelola desa wisata tersebut tidak berjalan baik, yang berdampak pada keberlangsungan program.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan dan efektivitas Program Lomba Desa Wisata Provinsi Bengkulu dengan fokus studi kasus di Kabupaten Kepahiang. Lokasi penelitian mencakup Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Dinas Pariwisata Kabupaten Kepahiang, serta beberapa desa peserta lomba yang menjadi objek kajian.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap pelaksanaan program. Total terdapat 12 informan, yang terdiri atas 4 pejabat dari Dinas Pariwisata (provinsi dan kabupaten), 6 pengurus

Pokdarwis, serta 2 perangkat desa yang terlibat langsung dalam kegiatan lomba.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjamin keabsahan hasil, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik.

Sebagai kerangka analisis utama, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam dkk. (1985), guna menilai relevansi, sumber daya, pelaksanaan, dan hasil dari program lomba desa wisata di Kabupaten Kepahiang secara menyeluruh.

### **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.**

Evaluasi pelaksanaan program lomba desa wisata Provinsi Bengkulu (Studi Kasus di Kabupaten Kepahiang) dalam penelitian ini di fokuskan pada penerapan teori evaluasi Stufflebeam dkk. (1985). Alasan utama pemilihan teori evaluasi Stufflebeam dkk. (1985) di bandingkan teori evaluasi lainnya karena teori ini menawarkan model yang komprehensif dan objektif serta praktis. Model ini terdapat empat indikator, yaitu *context, input, process*, serta *product*. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat memberikan analisis menyeluruh yang komprehensif mengenai kendala yang dihadapi selama pengembangan program, meningkatkan kualitas serta meningkatkan efektivitas program.

Hal ini menjadikan teori Stufflebeam dkk. (1985) sebagai pendekatan yang ideal untuk mengevaluasi pengembangan program yang spesifik di Kabupaten Kepahiang. Dalam pendekatan ini, peneliti dapat menemukan permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan program Lomba Desa Wisata yang di selenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu Di Kabupaten Kepahiang dapat berjalan dengan baik. Evaluasi ini memanfaatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta telaah dokumen yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan pendukung. Uraian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disusun berdasarkan empat indikator/model utama dari Stufflebeam dkk. (1985), dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Lomba Desa Wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Berikut merupakan uraian hasil dan pembahasan berdasarkan ke empat indikator/model teori Stufflebeam dkk. (1985) :

### **Context**

Evaluasi aspek konteks merupakan tahap awal dalam model CIPP yang bertujuan menilai relevansi, latar belakang, dan kebutuhan program terhadap kondisi lingkungan tempatnya diterapkan. Dalam konteks Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan Program Lomba Desa Wisata muncul sebagai respon terhadap tantangan rendahnya tingkat kunjungan wisatawan, keterbatasan diversifikasi ekonomi

desa, dan belum optimalnya pengelolaan potensi lokal. Secara substansial, program ini didesain untuk mendorong pembangunan desa berbasis potensi wisata, baik alam, budaya, maupun ekonomi kreatif, dengan mengedepankan prinsip kemandirian dan keberlanjutan.

Dari sisi kebijakan, keberadaan *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Desa Wisata* menjadi landasan hukum yang memperkuat arah pelaksanaan program. Regulasi ini tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata berbasis komunitas, tetapi juga menjadi instrumen sinkronisasi antarperangkat daerah, seperti Dinas Pariwisata, Dinas PMD, serta Bappeda. Dengan demikian, program ini memiliki legitimasi dan arah strategis yang jelas dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor dan keterbatasan mekanisme monitoring yang sistematis.

Dari hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa program ini relevan dengan kebutuhan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat identitas budaya lokal. Banyak desa yang sebelumnya tidak memiliki fokus wisata kini mulai mengembangkan potensi alam dan budaya mereka secara lebih terarah. Kelembagaan lokal seperti BUMDes dan Pokdarwis juga menunjukkan peningkatan peran, terutama dalam pengelolaan kegiatan wisata dan promosi produk lokal. Kesadaran masyarakat terhadap potensi

ekonomi pariwisata turut tumbuh seiring dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan lomba dan pembinaan dari pemerintah daerah.

Namun demikian, tidak semua desa berada pada tingkat kesiapan yang sama. Beberapa desa wisata yang memiliki akses infrastruktur dan dukungan masyarakat yang kuat mampu berkembang pesat, bahkan menjadi nominasi tingkat provinsi. Sementara itu, desa dengan sumber daya terbatas masih terkendala pada kurangnya pelatihan, minimnya fasilitas dasar, serta lemahnya jejaring promosi digital. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun program relevan secara kebijakan, pelaksanaannya belum sepenuhnya adaptif terhadap variasi kondisi lokal antar desa. Hal ini menjadi catatan penting dalam menilai kesesuaian konteks dengan strategi implementasi program.

Evaluasi konteks juga memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Banyak pengelola desa wisata belum memiliki kompetensi dalam manajemen destinasi, pemasaran digital, maupun pelayanan wisata berbasis pengalaman (*experiential tourism*). Padahal, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan masyarakat lokal mengelola potensi yang ada secara profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek kapasitas SDM perlu dijadikan fokus utama dalam rencana tindak lanjut program, terutama melalui pelatihan tematik, pendampingan intensif, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi atau pelaku industri pariwisata.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi konteks menunjukkan bahwa Program Lomba Desa Wisata di Kabupaten Kepahiang memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat desa. Program ini terbukti mampu menjadi katalis bagi penguatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan peningkatan identitas desa. Namun, keberlanjutan dan pemerataan dampaknya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan desa dalam memperkuat fondasi kelembagaan, memperluas jejaring kolaborasi lintas sektor, serta memastikan adanya strategi yang kontekstual sesuai kondisi tiap desa. Dengan pendekatan tersebut, program ini berpotensi berkembang menjadi model pembangunan desa berbasis pariwisata yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

### ***Input***

Evaluasi aspek *input* dalam model CIPP berfokus pada kesiapan sumber daya, kebijakan, dan strategi yang digunakan untuk mendukung keberhasilan program. Dalam konteks Program Lomba Desa Wisata di Kabupaten Kepahiang, komponen ini mencakup dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, kesiapan sumber daya manusia, pendanaan, serta infrastruktur pendukung di tingkat desa. Program ini dilaksanakan berdasarkan regulasi seperti *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022* tentang Pengembangan Pariwisata Daerah, yang menjadi dasar hukum bagi penguatan desa wisata berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menempatkan sektor pariwisata sebagai prioritas strategis dalam pembangunan daerah.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antara Dinas Pariwisata, pemerintah desa, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menjadi komponen penting dalam pelaksanaan program. Pokdarwis berperan sebagai ujung tombak kegiatan di lapangan, mulai dari pengelolaan atraksi wisata, pelatihan pemandu lokal, hingga kegiatan kebersihan dan promosi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih belum merata. Beberapa desa memiliki Pokdarwis yang aktif dan inovatif, sementara yang lain masih bergantung pada inisiatif kepala desa atau perangkat tertentu. Minimnya pelatihan dan pembinaan rutin menyebabkan kemampuan manajemen destinasi wisata belum berkembang secara optimal.

Aspek sumber daya manusia juga menjadi tantangan utama. Sebagian besar anggota Pokdarwis dan aparatur desa belum memiliki latar belakang di bidang pariwisata, manajemen, atau pemasaran digital. Akibatnya, banyak potensi wisata yang belum dikemas secara profesional dan berdaya saing. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dinilai masih bersifat formalitas dan belum menjangkau semua desa secara merata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan peningkatan kapasitas yang lebih berkelanjutan, termasuk pelatihan berbasis praktik lapangan dan pendampingan langsung dari tenaga ahli atau akademisi.

Dari segi pendanaan, pelaksanaan program Lomba Desa Wisata bersumber dari kombinasi Dana Desa, anggaran Dinas Pariwisata, serta kontribusi masyarakat lokal. Meskipun demikian, besaran anggaran yang dialokasikan masih terbatas dan belum mencukupi untuk pengembangan infrastruktur dan promosi jangka panjang. Keterlibatan sektor swasta seperti pelaku usaha, investor lokal, dan lembaga CSR juga masih minim. Padahal, kemitraan lintas sektor dapat menjadi sumber daya tambahan untuk memperkuat keberlanjutan program, terutama dalam pengelolaan fasilitas dan peningkatan daya tarik wisata.

Infrastruktur menjadi aspek input lain yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Akses jalan menuju beberapa destinasi masih sulit, terutama pada musim hujan, dan fasilitas pendukung seperti toilet umum, tempat parkir, serta area istirahat masih terbatas. Selain itu, belum semua desa memiliki regulasi internal atau peraturan desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan pariwisata. Kondisi ini membuat koordinasi antar pihak seringkali bersifat situasional dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan kegiatan.

Secara keseluruhan, aspek *input* Program Lomba Desa Wisata di Kabupaten Kepahiang dapat dikategorikan cukup baik karena telah memiliki dukungan kebijakan dan struktur kelembagaan yang jelas. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan

kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kemitraan dengan sektor swasta. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, program tidak hanya menjadi ajang kompetisi tahunan, tetapi juga mampu mendorong pembangunan pariwisata desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

### ***Process***

Evaluasi aspek *process* dalam model CIPP berfokus pada bagaimana program dilaksanakan, sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, serta bagaimana efektivitas koordinasi antar pihak yang terlibat. Dalam konteks Program Lomba Desa Wisata di Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui tahapan yang relatif sistematis, meliputi sosialisasi, seleksi administrasi, presentasi potensi desa, hingga verifikasi lapangan oleh tim juri provinsi. Setiap tahapan dirancang untuk menilai kesiapan desa dari segi kelembagaan, inovasi, dan potensi wisata yang dimiliki, sehingga proses pelaksanaan dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

Pada tahap sosialisasi, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme lomba. Proses ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pariwisata berbasis masyarakat. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa intensitas sosialisasi masih belum merata di seluruh desa. Beberapa desa yang berjarak jauh dari pusat

kabupaten mengalami keterlambatan informasi, sehingga waktu persiapan mereka lebih singkat dibandingkan desa lain yang memiliki akses komunikasi lebih baik.

Tahapan pelaksanaan juga memperlihatkan adanya semangat kolaboratif antara pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi aktor utama dalam menyiapkan dokumen, mengelola kegiatan, dan mengoordinasikan atraksi lokal. Aktivitas gotong royong seperti perbaikan fasilitas wisata, penataan lingkungan, serta pelatihan pemandu lokal menjadi bagian nyata dari keterlibatan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa program mampu menumbuhkan partisipasi aktif warga dan memperkuat identitas sosial berbasis budaya lokal.

Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Beberapa pengelola desa wisata belum memiliki kemampuan manajerial dan promosi digital yang memadai, sehingga informasi tentang potensi wisata belum tersebar luas. Keterbatasan sumber daya manusia juga menyebabkan pengelolaan kegiatan masih berfokus pada persiapan lomba, bukan pada pengembangan jangka panjang. Selain itu, jadwal kegiatan yang padat dan minimnya waktu pendampingan dari pihak provinsi menyebabkan sebagian desa kesulitan dalam memenuhi standar administratif maupun teknis yang ditetapkan.

Dalam hal koordinasi antar pihak, ditemukan bahwa hubungan antara Dinas Pariwisata Provinsi,

Kabupaten, dan pemerintah desa sudah cukup baik, namun belum terlembaga secara permanen. Proses komunikasi masih bersifat ad hoc dan belum didukung sistem monitoring yang terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, evaluasi terhadap capaian tiap tahapan belum sepenuhnya berbasis data yang sistematis. Padahal, keberadaan sistem evaluasi berbasis data penting untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi dan memantau dampak program secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, proses pelaksanaan Program Lomba Desa Wisata di Kabupaten Kepahiang dapat dikategorikan efektif karena mampu membangun kolaborasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata lokal. Namun, agar keberlanjutannya lebih kuat, dibutuhkan penguatan kelembagaan Pokdarwis, pelatihan berkelanjutan dalam bidang manajemen dan digitalisasi promosi, serta penerapan sistem evaluasi berbasis data. Upaya tersebut akan memperkuat tata kelola program sehingga pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada lomba, tetapi juga pada pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

### ***Product***

Evaluasi aspek *product* dalam model CIPP berfungsi menilai sejauh mana tujuan program tercapai dan bagaimana dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat. Dalam konteks Program Lomba Desa Wisata di Kabupaten Kepahiang, hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini berhasil menciptakan berbagai capaian positif yang relevan dengan tujuan pembangunan pariwisata

berbasis masyarakat. Program tidak hanya menghasilkan peningkatan jumlah desa wisata yang aktif, tetapi juga memicu kesadaran baru di kalangan aparatur desa dan masyarakat akan potensi ekonomi dan budaya yang mereka miliki. Dengan demikian, program ini telah berperan sebagai katalis bagi perubahan sosial dan ekonomi di tingkat desa.

Dari sisi kelembagaan, banyak desa yang sebelumnya belum memiliki struktur pengelola wisata kini mulai membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan forum masyarakat pariwisata lokal. Keberadaan lembaga ini memperkuat tata kelola dan koordinasi antar pihak, sekaligus menjadi wadah partisipasi warga dalam merencanakan dan mengelola potensi wisata. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah berupa pelatihan manajemen wisata dan pengelolaan keuangan juga membantu meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam merancang kegiatan pariwisata secara lebih profesional dan akuntabel.

Aspek *product* juga menunjukkan penguatan pada bidang ekonomi lokal. Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan wisata menjadi salah satu indikator nyata keberhasilan program. Produk-produk lokal seperti kuliner khas, kerajinan tangan, dan hasil pertanian mulai dikembangkan sebagai bagian dari atraksi wisata. Dukungan dana hadiah lomba dan pemanfaatan Dana Desa untuk infrastruktur pendukung turut memperkuat ekosistem ekonomi desa. Dengan demikian, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan daya tarik wisata,

tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Dari sisi branding dan promosi, program ini mendorong desa untuk menonjolkan identitas dan keunikan masing-masing. Upaya memperkuat citra desa melalui media sosial, festival budaya, dan konten digital mulai berkembang, terutama di desa-desa yang memiliki sumber daya manusia muda yang kreatif. Beberapa desa bahkan berhasil memperoleh pengakuan di tingkat nasional, yang secara tidak langsung memperluas jaringan kemitraan dan peluang investasi. Hal ini menunjukkan bahwa *output* program bukan hanya berupa peningkatan jumlah pengunjung, tetapi juga peningkatan visibilitas dan daya saing destinasi di tingkat regional.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi hasil program. Partisipasi masyarakat di beberapa desa masih bersifat sporadis dan belum merata, terutama di daerah dengan akses terbatas atau infrastruktur jalan yang kurang memadai. Selain itu, atraksi budaya dan wisata buatan masih terbatas, sehingga daya tarik desa wisata cenderung bergantung pada potensi alam yang belum sepenuhnya dikelola secara kreatif. Minimnya pendampingan pasca-lomba dan rendahnya literasi digital di kalangan pengelola juga menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan promosi wisata secara mandiri.

Untuk itu, dibutuhkan strategi pembinaan lanjutan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama Dinas Pariwisata perlu memperkuat model

pengelolaan destinasi berbasis *Destination Management Organization* (DMO) agar koordinasi antar pelaku pariwisata lebih sistematis dan berorientasi pada keberlanjutan. Pelatihan digital marketing, inovasi produk wisata, dan fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta perlu diintensifkan untuk memperluas dampak ekonomi program. Dengan pendekatan yang terarah dan kolaboratif, Program Lomba Desa Wisata di Kabupaten Kepahiang dapat berkembang menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing daerah serta menjaga keberlanjutan ekonomi dan budaya lokal.

Meskipun penelitian ini telah berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan Program Lomba Desa Wisata di Kabupaten Kepahiang, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, jumlah informan yang terbatas sebanyak 12 orang, terdiri dari pejabat Dinas Pariwisata dan perangkat desa, membuat hasil penelitian ini belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh variasi pengalaman dan persepsi pelaku wisata di berbagai desa. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada satu kabupaten sehingga generalisasi temuan ke wilayah lain di Provinsi Bengkulu masih perlu dilakukan dengan hati-hati. Ketiga, pendekatan kualitatif yang digunakan menekankan pada kedalaman data, namun belum mengukur secara kuantitatif dampak ekonomi program terhadap masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian *mixed methods* yang mengombinasikan pendekatan

kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih terukur. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas lokasi kajian ke beberapa kabupaten lain guna melihat perbandingan efektivitas program antar daerah. Fokus tambahan pada strategi keberlanjutan pasca-lomba dan peran kemitraan publik-swasta juga penting untuk mengembangkan model pengelolaan desa wisata yang lebih adaptif dan berdaya saing.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*), dapat disimpulkan bahwa Program Lomba Desa Wisata di Kabupaten Kepahiang memiliki relevansi tinggi terhadap upaya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Dari aspek *context*, program ini telah sejalan dengan kebutuhan desa dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada aspek *input*, antusiasme dan komitmen Dinas Pariwisata serta pemerintah desa cukup kuat, namun efektivitas pelaksanaan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan sarana pendukung. Pada aspek *process*, kegiatan lomba dilaksanakan sesuai prosedur, tetapi kurangnya pendampingan pasca-lomba dan lemahnya koordinasi antar pihak mengurangi keberlanjutan hasil. Dari aspek *product*, program berhasil meningkatkan kesadaran potensi wisata dan identitas lokal, tetapi belum menghasilkan dampak

ekonomi yang signifikan atau model pengelolaan berkelanjutan.

Implikasinya terhadap kebijakan, diperlukan penguatan kelembagaan desa wisata, penyusunan panduan teknis pendampingan pasca-lomba, serta integrasi program ini ke dalam rencana pembangunan daerah.

Rekomendasi mencakup: (1) peningkatan kapasitas SDM Pokdarwis melalui pelatihan rutin, (2) penetapan skema pendanaan berkelanjutan dan insentif bagi desa aktif, (3) penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi, serta (4) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital untuk memastikan keberlanjutan program.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antouw, S. .., Ngangi, C. R., dan Lolowang, T. F. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Dengan Model Cipp (Contex, Input, Process, Product) Di Kota Bitung. Agri-Sosioekonomi, 13(3A), 95. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.3.a.2017.18031>
- Artanto, D., dan Ibadin, H. (2023). Penerapan Evaluasi Cipp (Context, Input, Process, Product) Dalam Program Rintisan Madrasah Unggul Di Mtsn 1 Yogyakarta. Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5(1), 68-82.
- Budiman, M. A. (2017). Pengukuran User Experience Pada Aplikasi Berbasis Web Menggunakan Metode Heuristic Evaluation (Studi Kasus : Aplikasi Praktikum Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan Bandung). 1-4. <http://repository.unpas.ac.id/26817>.
- Darmi, T. (2024). Peran Stakeholders dalam

- Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Curug 9 di Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 6(1), 81-91.
- Febriana, D. B., & Indarti, S. (2024). Pengembangan Daya Tarik Wisata Bukit Makmur di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. *PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration*, 1(2), 168-176.
- Indarti, S., Rosidin, R., Thaap, J. I., dan Trisnawati, N. (2022). Analysis The Role of Stakeholders in Development Waterfall Tourism Mandi Angin in Air Berau Village Subdistrict Pondok Suguh Regency Mukomuko. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(2), 199-204.
- Mathison, S. (2017). Cipp Model (Context, Input, Process, Product). *Encyclopedia of Evaluation*, 342-347. [https://doi.org/10.4135/978141295055\\_8.n82](https://doi.org/10.4135/978141295055_8.n82)
- Nasution, A. R. S. M. A. (2022). Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(Vol 9 No 2 (2022)), 271-276. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/3100/2713>
- Nur, I., dan Mariantha, I. N. (2018, October). Implikasi Pengembangan Desa Wisata Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal. In Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan (Vol. 1, No. 1, Pp. 1090-1104).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun, P. D. K. K. N. 5. (2022). Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata. 9, 356-363.
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun, P. D. P. B. N. 8. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024. 15(1), 37-48.
- Pratama, I. A. (2022). Evaluasi Program Cleanliness Healty Safety Enviroment Pada Objek Wisata Bukit (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung).
- Rahayu, A., Putri, B., & Darmi, T. (2024). Implementasi Program Pengenaan Sanksi Administratif pada Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Bengkulu. 1, 153-160.
- Sari, R. J. (2022). Evaluasi Program Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengembangkan Objek Wisata Bakar Tongkang. <https://repository.uir.ac.id/18335/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/18335/1/187310346.pdf>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
- Ulvansyah, F., Indarti, S., & Darmi, T. (2023). Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 5(1), 62-70. <https://doi.org/10.31539/joppas.v5i1.7842>
- Yolanda, Y. (2021). Abstrak Evaluasi Pelaksanaan Event Wisata Nasional Festival Bakar Tongkang Tahun 2019 Pada Dinas Pariwisata. Skripsi, 110.